

**PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana**

**Deddy Theohery
NIM: 312014185**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
SALATIGA
Januari 2018**



PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy Theohery
NIM : 312014185 Email : deddytheohery@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia
Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional
Pembimbing : 1. Arie Siswanto, S.H., M.Hum
2. _____

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Kristen Satya Wacana maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Kristen Satya Wacana.

Salatiga, 26 Januari 2018





PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA
Jl. Diponegoro 52 – 60 Salatiga 50711
Jawa Tengah, Indonesia
Telp. 0298 – 321212, Fax. 0298 321433
Email: library@adm.uksw.edu ; http://library.uksw.edu

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Deddy Theohery
NIM : 312014185 Email : deddytheohery@gmail.com
Fakultas : Hukum Program Studi : Ilmu Hukum
Judul tugas akhir : Pengelolaan Pulau - Pulau Kecil Termar Indonesia
Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional

Dengan ini saya menyerahkan hak *non-eksklusif** kepada Perpustakaan Universitas – Universitas Kristen Satya Wacana untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak yang sesuai):

- ☒ a. Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA
- ☐ b. Saya tidak mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repositori Perpustakaan Universitas, dan/atau portal GARUDA**

* Hak yang tidak terbatas hanya bagi satu pihak saja. Pengajar, peneliti, dan mahasiswa yang menyerahkan hak non-eksklusif kepada Repositori Perpustakaan Universitas saat mengumpulkan hasil karya mereka masih memiliki hak copyright atas karya tersebut.

** Hanya akan menampilkan halaman judul dan abstrak. Pilihan ini harus dilampiri dengan penjelasan/ alasan tertulis dari pembimbing TA dan diketahui oleh pimpinan fakultas (dekan/kaprodi).

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Salatiga, 26 Januari 2018

Deddy Theohery

Tanda tangan & nama terang mahasiswa

Mengetahui,

ARIE SISWAN TO

Tanda tangan & nama terang pembimbing I

Tanda tangan & nama terang pembimbing II

Lembar Persetujuan

**PENGELOLAAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR
INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM LAUT
INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Kristen Satya Wacana**

**Deddy Theohery
NIM: 312014185**

Pembimbing

1956

Arie Siswanto, SH., M.Hum


Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Januari 2018

Lembar Pengujian

Komisi Penguji

Penguji I



Dr. Jumiarti, SH., M.Hum

Penguji II



Arie Siswanto, S.H., M.Hum

Penguji III



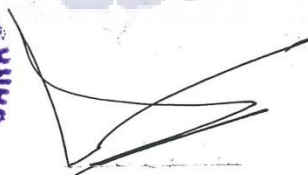
R.E.S. Febia, S.H., MIDS

Diuji pada tanggal 23 Januari 2018

1956

Mengesahkan,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Dr. Marihot Janpieter Hutajulu, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

UCAPAN TERIMA KASIH	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Hukum Laut Internasional	13
A.1. Pengertian Hukum Laut Internasional	13
A.2. Perkembangan Hukum Laut Internasional	16
A.2.1. Zaman Romawi	17
A.2.2. Masa Abad Pertengahan	19
A.2.3. Zaman Modern	28
A.3. Sumber-Sumber Hukum Laut Internasional	41
B. Ketentuan Hukum Laut Internasional Tentang Pulau	49
B.1. Pengertian Pulau	49
B.2. Kategori Pulau	52
B.2.1. Pulau Alami	52
B.2.2. Pulau Buatan	58
B.3. Fungsi Pulau Dalam Penentuan Wilayah Laut	62
B.3.1. Laut Teritorial	63

B.3.2. Perairan Kepulauan (<i>Archipelagic Water</i>)	70
B.3.3. Perairan Pedalaman.....	71
C. Konsep Negara Kepulauan Menurut Hukum Laut Internasional .	74
C.1. Pengertian Negara Kepulauan (<i>Archipelagic State</i>)	74
C.2. Pengaturan Hukum Laut Internasional Tentang Negara Kepulauan	75
C.3. Indonesia Sebagai Negara Kepulauan	85
C.3.1. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perairan Nasional Indonesia	85
C.3.2. Peraturan Perundang-undangan Mengenai Garis Pangkal Kepulauan Indonesia	87
D. Pengaturan Indonesia Tentang Pulau-Pulau Kecil Terluar	105
BAB III ANALISA	110
A. Kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia Menurut Norma- Norma Hukum Laut Internasional	110
B. Prinsip Pengelolaan Oleh Pemerintah Terhadap Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia	123
BAB IV PENUTUP	127
A. Kesimpulan	127
B. Saran	129
DAFTAR BACAAN	130

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Dalam Perspektif Hukum Laut Internasional” ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

Dalam pembuatan skripsi hingga terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Arie Siswanto, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana dan Pembimbing yang telah berbaik hati untuk bersedia memberikan waktu, pikiran dan kesabaran untuk membimbing penulis.
2. Bapak R.E.S. Fobia, S.H., MIDS dan Ibu Dr. Jumiarti, S.H., M.Hum selaku penguji yang bersedia untuk menguji dan memberikan masukan untuk penulis.
3. Dr. Marihot Jan Pieter Hutajulu, S.H., M.Hum selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan wali studi penulis yang mendampingi dari awal kuliah hingga selesai.
4. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum yang telah bersedia mengajar dan memberikan ilmu serta memberikan nasehat dan bimbingan dalam menempuh pendidikan Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.

5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang telah membantu penulis dalam hal administrasi ataupun segala informasi selama kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
6. Keluarga penulis, Adolf Pattilawa (Bapak), Posma Uli Arta (Ibu), serta Erica Octavia (Adik Perempuan). Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga besar penulis Opung, Tulang, Nantulang, Ua, Mama Tua, Bapa Tua, Tante, Om, dan Sepupu yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat semangat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh teman-teman dan sahabat penulis, baik teman di SMA, teman kuliah dan kakak angkatan Fakultas Hukum dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu menemani dan menjadi penyemangat dengan memberikan dukungan yang terbaik untuk penulis.
8. Serta seluruh pihak lain yang ikut membantu secara langsung maupun tidak langsung. Penulis hanya dapat mendoakan, kiranya Tuhan Yesus membalas segala kebaikan kalian. Amin

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf jika ada kesalahan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan bernilai bagi pihak yang membutuhkan. Tuhan Yesus Memberkati.

KATA PENGANTAR

Hukum laut internasional adalah seperangkat norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara pantai atau yang berhubungan dengan pantai, yang terkurung oleh daratan dan atau organisasi maupun subyek hukum internasional lainnya, yang mengatur mengenai kedaulatan negara atas laut, yuridiksi negara dan hak-hak negara atas perairan tersebut. Hukum laut internasional mempelajari tentang aspek-aspek hukum dilaut dan peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi di laut.

Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut tidak saja menghasilkan pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state principle*), tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai yang secara menyeluruh lebih kuat terhadap negara maritim daripada di masa-masa sebelumnya.

Sehingga, bagi Indonesia sebagai negara yang berbentuk kepulauan, keberadaan pulau-pulau kecil terluar tersebut memiliki nilai strategis yang sangat penting karena berdasarkan UNCLOS 1982 pulau-pulau kecil terluar tersebut digunakan sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam pengukuran dan penetapan batas wilayah negara Indonesia dengan negara tetangga terutama dalam pengukuran dan penentuan batas wilayah perairannya.

Strategi pengelolaan pulau-pulau terluar Indonesia oleh pemerintah sebagai wujud implementasi normatif dari UNCLOS 1982, pemerintah Indonesia menuangkan pengaturan mengenai pengelolaan dan pengamanan pulau terluar Indonesia ini dalam Peraturan Presiden No. 78 Tahun 2005 yaitu tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar dan Peraturan Pemerintah No. 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Walaupun pemerintah sudah mengeluarkan beberapa peraturan nyatanya masih banyak pulau-pulau terluar Indonesia yang masih terlantar, dari 111 pulau yang berada titik terluar wilayah Indonesia, 67 diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga, dari 67 pulau tersebut hanya 28 pulau yang berpenduduk sementara 39 lagi masih kosong. Contohnya: pulau Alor yang berbatasan dengan Timor Leste, pulau Miangas yang berbatasan dengan Filipina, dan masih banyak lagi. Negara kita telah berumur 72 tahun sudah banyak perjanjian batas maritim yang disepakati oleh negara tetangga, tetapi tidak sedikit juga permasalahan yang masih harus sesegera mungkin diselesaikan. Oleh karena itu kelautan harus mendapat perhatian serius dari pemerintah, karena masih banyak permasalahan batas maritim yang belum terselesaikan. Negara Kepulauan Indonesia yang memiliki posisi strategis menuntut adanya kekuatan kelautan yang dapat menjamin terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi seluruh kegiatan kelautan.

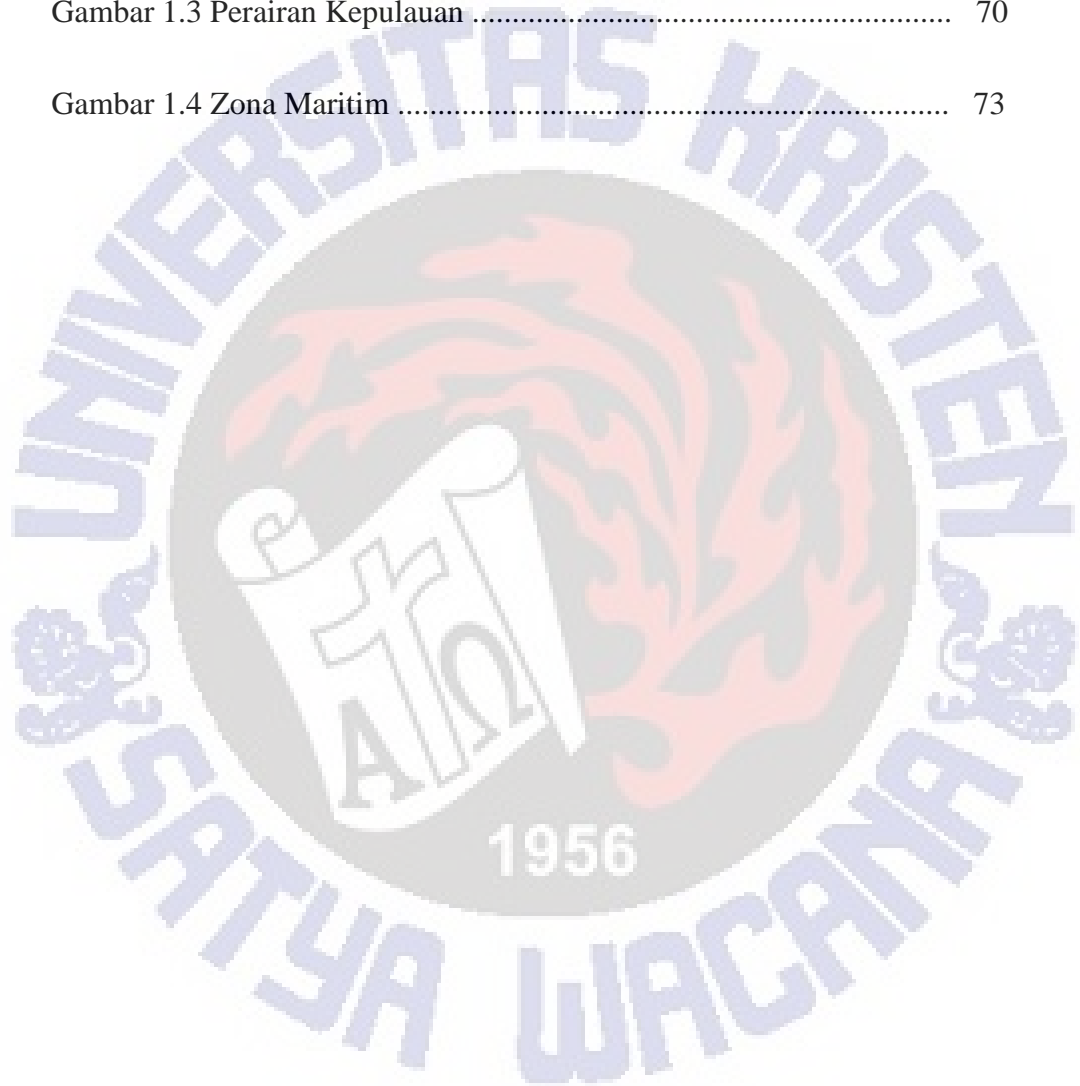
Dalam skripsi ini dibahas tentang kedudukan pulau-pulau kecil terluar Indonesia di “mata” Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia. Sehingga membentuk suatu wilayah laut Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salatiga, 23 Januari 2018

Deddy Theohery

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 <i>Normal Base Line</i>	65
Gambar 1.2 <i>Straight Base Line Point to Point</i>	66
Gambar 1.3 Perairan Kepulauan	70
Gambar 1.4 Zona Maritim	73



ABSTRAK

Skripsi ini dibahas tentang kedudukan pulau-pulau kecil terluar Indonesia dalam perspektif Hukum Laut Internasional serta peran pemerintah dalam mengelola, menjaga, dan memanfaatkan pulau-pulau kecil terluar Indonesia yang menjadi dasar pengukuran garis kepulauan Indonesia. Sehingga membentuk suatu wilayah laut Teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan dan peran pemerintah dalam mengelola pulau-pulau kecil terluar yang dimaksud adalah tanggung jawab Negara dalam melindungi pulau-pulau kecil terluar yang secara kedudukannya dalam perspektif Hukum Laut Internasional menjadi titik dasar dalam penarikan garis pangkal kepulauan Indonesia. Di Indonesia sudah banyak peraturan peundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai pulau-pulau terluar tetapi masih banyak sengketa laut terutama yang menyangkut kepulauan. Sehingga apakah tanggung jawab tersebut hanya sebatas peraturan saja atau dalam bentuk kerja nyata ?

Pulau-Pulau Kecil Terluar Indonesia jangan dianggap sebelah mata karna PPKT tersebut sebagai titik central dalam menentukan laut teritorial Indonesia dan sebagai “patok” keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam skripsi ini juga melihat pada kasus sengketa yang ada, serta prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar oleh pemerintah. Dengan melihat hal tersebut, penulis menjadikan hal tersebut sebagai batu pijakan untuk menganalisis prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar Indonesia serta kedudukan PPKT tersebut dalam perspektif Hukum Laut Internasional.

Kata Kunci : **Kedudukan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Prinsip Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Hukum Laut Internasional, Negara Kepulauan, Pulau**